



RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN BONANG
KABUPATEN DEMAK

TAHUN
2021



Jalan Raya Demak – Moro KM. 12 Bonang Demak

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja(Renja) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2021.Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2021 ini merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun2016-2021.

Renja Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2021 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bonang Kabupaten Demak untuk satu tahun anggaran ke depan, yaitu tahun 2021. Peran serta dari seluruh stakeholder dalam rangka penyusunan dan pencapaian tujuan dalam Renja ini sangat diperlukan. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2021 ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan saran maupun kritik yang sifatnya membangun. Semoga Renja Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tahun 2021 ini dapat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak.

Ditetapkan : Bonang
Pada Tanggal : 12 Juli 2020

 CAMAT BONANG

HARIS WAHYUDI RIDWAN.AP.M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19760606 199501 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	26
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	27
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	49
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan terhadap kebijakan	55
3.2 Tujuan Kecamatan Bonang	55
3.3 Sasaran.....	55
3.4 Program dan Kegiatan	56
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	64
BAB V PENUTUP	
5.1 Catatan Penting	77
5.2 Kaidah Pelaksanaan	79
5.3 Rencana Tindak Lanjut.....	79

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dimaksud dengan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Pelaksanaan pembangunan diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, sertakemandirian.

Perencanaan pembangunan mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu. Tujuan disusunnya perencanaan pembangunan yaitu dalam rangka mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antarwaktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Perencanaan pembangunan disusun sebagai upaya menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Selain itu dalam perencanaan pembangunan berusaha mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan memberikan jaminan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, danberkelanjutan.

Lingkup penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berdasarkan tahapannya meliputi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu perencanaan jangka panjang untuk periode atau kurun waktu 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan. Adapun Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah dokumen perencanaan untuk 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional

yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum daerah serta program-program yang memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh daerah.

Sementara itu rencana kerja pembangunan tahunan daerah atau yang dikenal sebagai RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dengan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam rangka implementasi pembangunan yang akan dicapai untuk perencanaan jangka menengah, kepala daerah terpilih secara organisatoris dibantu oleh organisasi perangkat daerah dalam upaya mencapai visi dan misi pembangunannya. Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk menjabarkan visi dan misi kepala daerah lima tahun mendatang, perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun perencanaan lima tahunan yang disebut dengan Rencana Strategis.

Bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) disusun dengan berpedoman pada RPJMD untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta wajib menerapkan dan mencapai Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan kementerian/lembaga. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat, merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Tugas kecamatan di Kabupaten Demak yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Tugas utama yang menjadi kewenangan Kecamatan di Kabupaten Demak adalah melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pada kegiatan di bidang tata pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang dipakai sebagai dasar hukum dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.

26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak 2016 – 2021.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020;
29. "Peraturan Bupati Demak Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
30. Demak Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis
31. Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021"
32. Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak;
33. Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah Terpadu Melalui Aplikasi Perencanaan Elektronik (e-Planning) dan Penganggaran Elektronik (e-Budgeting) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 100 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah Terpadu Melalui Aplikasi Perencanaan Elektronik (e-Planning) dan Penganggaran Elektronik (e-Budgeting)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bonang ini adalah untuk:

1. Menjabarkan visi, misi dan program Kecamatan Bonang secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2020 sesuai dengan urusan dan kewenangan Kecamatan Bonang.

3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bonang untuk tahun 2020.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Kecamatan Bonang ini ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Kecamatan Bonang dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2020.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Kecamatan Bonang.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Bonang pada tahun 2020.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan
- 3.2 Tujuan Kecamatan Bonang
- 3.3 Sasaran
- 3.4 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

- 5.1 Catatan Penting
- 5.2 Kaidah Pelaksanaan
- 5.3 Rencana Tindak Lanju

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD TahunLalu

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Kecamatan Bonang. Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian (Resntra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Pengeluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rentra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD		4.528.658.003	1.436.639.162	596.000.000	454.831.406	76,31	880.500.000	2.771.970.568	61,21

5	2	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor	569.095.110	311.037.785	213.600.000	206.321.406	96,59	-	517.359.191	90,91
5	2	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlayannya administrasi perkantoran	3.852.200	2.152.000	1.350.000	1.350.000	100		3.502.000	90,91
5	2	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi.sumber daya air dan listrik	Tercapainya kelancaran komunikasi telepon, air dan listrik	65.228.747	33.032.336	28.050.000	26.266.525	93,64		59.298.861	90,91
5	2	1	5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terbayarnya jasa asuransi barang milik daerah	4.398.900	3.999.000	0	-	#DIV/0!		3.999.000	90,91
5	2	1	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya honor pelaksana kegiatan	50.160.000	27.600.000	18.000.000	18.000.000	100		45.600.000	90,91
5	2	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	22.000.000	12.000.000	8.000.000	8.000.000	100		20.000.000	90,91
5	2	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terseduanya barang cetakan dan penggandaan	17.372.144	9.797.289	6.000.000	5.995.569	99,93		15.792.858	90,91
5	2	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	20.350.000	10.000.000	8.500.000	8.500.000	100		18.500.000	90,91

5	2	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor	15.895.000	9.950.000	4.500.000	4.500.000	100		14.450.000	90,91
5	2	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan per Undang-Undang	8.289.600	5.036.000	2.500.000	2.500.000	100		7.536.000	90,91
5	2	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	74.966.100	38.351.000	30.000.000	29.800.000	99,33		68.151.000	90,91
5	2	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi secara vertikal dan horisontal	53.460.000	24.900.000	25.000.000	23.700.000	94,8		48.600.000	90,91
5	2	1	19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Terbayarnya pegawai non PNS	233.122.419	134.220.160	81.700.000	77.709.312	95,12		211.929.472	90,91
5	2	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras penunjang pelayanan	918.446.211	469.860.377	153.750.000		-	-	469.860.377	51,16
5	2	2	3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	339.519.400	154.327.000	0	154.327.000	#DIV/0!		308.654.000	90,91

5	2	2	5	Pengadaan Kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas yg diadakan	108.730.400	40.332.000	0	40.332.000	#DIV/0!		80.664.000	74,19
5	2	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yg diadakan	213.018.000	95.352.727	98.300.000	98.300.000	100		193.652.727	90,91
5	2	2	10	Pengadaan Mebelair	Jumlah meubelair yg diadakan	21.670.000	19.700.000	0	-	#DIV/0!		19.700.000	90,91
5	2	2	21	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas	72.831.000	61.210.000	5.000.000	5.000.000	100		66.210.000	90,91
5	2	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	57.200.000	37.000.000	15.000.000	15.000.000	100		52.000.000	90,91
5	2	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	86.654.212	50.438.650	31.450.000	28.337.906	90,1		78.776.556	90,91
5	2	2	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	14.423.200	11.500.000	4.000.000	1.612.000	40,3		13.112.000	90,91
5	2	2		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	4.400.000	0	4.000.000	4.000.000	100		4.000.000	90,91
5	2	2	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair	Terpeliharanya mebeleur kantor	-	0	-	-	#DIV/0!		-	#DIV/0!

5	2	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras penunjang pelayanan	1.237.388.581	-	-	-	#DIV/0!	345.800.000	345.800.000	27,95
5	2	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yg diadakan	213.018.000				100	5.500.000	193.652.727	63,44
5	2	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	57.200.000				100	45.000.000	52.000.000	85,17
5	2	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yg diadakan	86.654.212				90,1	35.000.000	78.776.556	43,01
5	2	2	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	14.423.200				40,3	4.000.000	13.112.000	21,48
5	2	2		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	4.400.000				100	4.000.000	4.000.000	#DIV/0!
5	2	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlayaninya administrasi perkantoran	6.012.200				100	2.080.000	3.502.000	60,8
5	2	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi.sumber daya air dan listrik	Tercapainya kelancaran komunikasi telepon, air dan listrik	103.728.747				93,64	35.000.000	59.298.861	48,57

5	2	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor	20.470.000				100	4.500.000	14.450.000	31,56
5	2	1	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya honor pelaksana kegiatan	72.060.000				100	18.000.000	45.600.000	49,79
5	2	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	41.361.960				100	8.000.000	20.000.000	81,9
5	2	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	23.372.144				99,93	6.000.000	15.792.858	65,36
5	2	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	36.350.000				100	2.500.000	18.500.000	60,61
5	2	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan per Undang-Undang	10.089.600				100	1.820.000	7.536.000	41,15
5	2	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	123.966.100				99,33	35.000.000	68.151.000	47,65

5	2	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi secara vertikal dan horisontal	88.460.000					94,8	49.000.000	48.600.000	53,07
5	2	1	19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Terbayarnya pegawai non PNS	335.822.419					95,12	90.400.000	211.929.472	40,4
5	2	3		Program Peningkatan Disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan ASN	28.000.000	12.500.000	-	-		#DIV/0!		12.500.000	44,64
5	2	3	1	Pengadaan mesin kartu/absensi	Jumlah mesin absensi elektronik	2.750.000	2.500.000				#DIV/0!		2.500.000	90,91
5	2	3	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terwujudnya pakaian dinas beserta perlengkapannya	25.250.000	10.000.000				#DIV/0!		10.000.000	39,6
5	2	5		Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan SDM aparatur kecamatan	345.518.000	98.380.000	63.000.000	63.000.000		100	80.000.000	241.380.000	69,86
5	2	5	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	345.518.000	98.380.000	63.000.000	63.000.000		100	80.000.000	241.380.000	69,86
				URUSAN WAJIB		-					#DIV/0!		-	#DIV/0!

				PENDIDIKAN		-				#DIV/0!		-	#DIV/0!
5	2	15		Program Pendidikan Usia Dini	Penyelenggaraan Rakor dan kerjasama PAUD	10.868.000	4.900.000		4.980.000	#DIV/0!		9.880.000	90,91
5	2	15	63	Penyelenggaraan Koordinasi dan kerjasama Pendidikan anak usia dini	Jumlah kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan PD/instansi vertikal	10.868.000	4.900.000		4.980.000	#DIV/0!		9.880.000	90,91
				PERENCANAAN PEMBANGUNAN		-			-	#DIV/0!		-	#DIV/0!
5	2	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan di desa	31.760.000	16.600.000	5.000.000	5.000.000	100		21.600.000	68,01
5	2	21	9	Penyelenggaraan Musrenbang RKP	Jumlah forum musrenbang yang dilaksanakan	31.760.000	16.600.000	5.000.000	5.000.000	100		21.600.000	68,01
				KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA		-			-	#DIV/0!		-	#DIV/0!

5	2	15		Program Keluarga Berencana	Terlaksananya pencanangan Kampung KB	19.800.000	18.000.000	-	-	#DIV/0!		18.000.000	90,91
5	2	15	9	Pencanangan Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang dicanangkan	19.800.000	18.000.000			#DIV/0!		18.000.000	90,91
5	2	18		Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba.PMS termasuk HIV/AIDS	Jumlah pemuda/pelajar yang mendapatkan penyuluhan	27.390.000	24.900.000	-	-	#DIV/0!		24.900.000	90,91
5	2	18	1	Penyuluhan tentang bahaya Narkoba	Peserta penyuluhan	27.390.000	24.900.000			#DIV/0!		24.900.000	90,91
				SOSIAL		-	-			#DIV/0!		-	#DIV/0!
5	2	15		Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	Terwujudnya sinkronisasi program pengentasan kemiskinan	35.068.000	24.880.000	7.000.000	7.000.000	100		31.880.000	90,91

				Pelatihan ketrampilan kewirausahaan bagi keluarga miskin	Jumlah warga miskin yang dilatih	35.068.000	24.880.000	7.000.000	7.000.000	100		31.880.000	90,91
5	2	22		Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan	Terselenggaranya komunikasi Ulama Umaro dan MTQ	103.390.000	84.900.000	-	-	#DIV/0!		84.900.000	82,12
			1	Penyelenggaraan MTQ dan STQ tingkat Kecamatan	Jumlah peserta MTQ yang dikirim	27.390.000	24.900.000			#DIV/0!		24.900.000	90,91
			2	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro	Jumlah penyelenggaraan kegiatan FKUU	76.000.000	60.000.000			#DIV/0!		60.000.000	78,95
				KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH		-				#DIV/0!		-	#DIV/0!
5	2	16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Sektor UMKM	Meningkatnya UKM yang difasilitasi perijinan	-	0		14.880.000	#DIV/0!		14.880.000	#DIV/0!

				Sosialisasi dan pelatihan Pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan usaha mikro kecil menengah	Kegiatan Pasar Murah dan pengembangan UMKM Tingkat Kecamatan	-				#DIV/0!	-	#DIV/0!	
			5	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Jumlah peserta yang memiliki produk lokal yang dibina dalam melakukan promosi hasil produksi	-	-			#DIV/0!	-	#DIV/0!	
				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI		-	-			#DIV/0!	-	#DIV/0!	
5	2	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Menurunja konflik masyarakat	485.319.600	36.486.000	48.150.000	48.150.000	100	320.200.000	404.836.000	83,42
			5	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	479.725.000	31.400.000	48.150.000	48.150.000	100	320.200.000	399.750.000	83,33

			12	Pembinaan Pedagang Kaki Lima	Pengendalian keamanan lingkungan Pedagang kaki lima	5.594.600	5.086.000			-	#DIV/0!		5.086.000	90,91
2	5	16		Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Meningkatnya jumlah aparat yang dilatih	59.280.000	44.800.000			-	#DIV/0!		44.800.000	75,57
				Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatsn wawasan kebangsaan	Jumlah duta seni dan budaya yang dikirim	41.020.000	28.200.000			-	#DIV/0!		28.200.000	68,75
			4	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah	Jumlah aparat yang dilatih dibidang siskamswakarsa	18.260.000	16.600.000			-	#VALUE!		16.600.000	90,91
5	2	18		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya kesadaran nilai-nilai kebangsaan dan budaya pada masyarakat	252.098.000	47.180.000	52.500.000	52.500.000		100	109.500.000	209.180.000	82,98

			9	Upacara hari hari besar Nasional maupun daerah	Jumlah upacara hari besar yang terselenggara	69.300.000	43.000.000			#DIV/0!		43.000.000	62,05
5	2	22		Program Pencegahan Dini Penanggulangan Korban Bencana Alam	Menurunya potensi konflik masyarakat	1.848.000	1.680.000			#DIV/0!		1.680.000	90,91
			1	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Jumlah Desa yang menjadi cakupan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	2.750.000	2.500.000			#DIV/0!		2.500.000	90,91
				Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah penyelenggaraan kegiatan FKUU dan Jumlah peserta MTQ yang dikirim	140.250.000		18.000.000	18.000.000		109.500.000	127.500.000	90,91
				Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Terwujudnya pentas seni dan budaya festival, lomba cipta dengan lancar	37.950.000		34.500.000	34.500.000			34.500.000	90,91

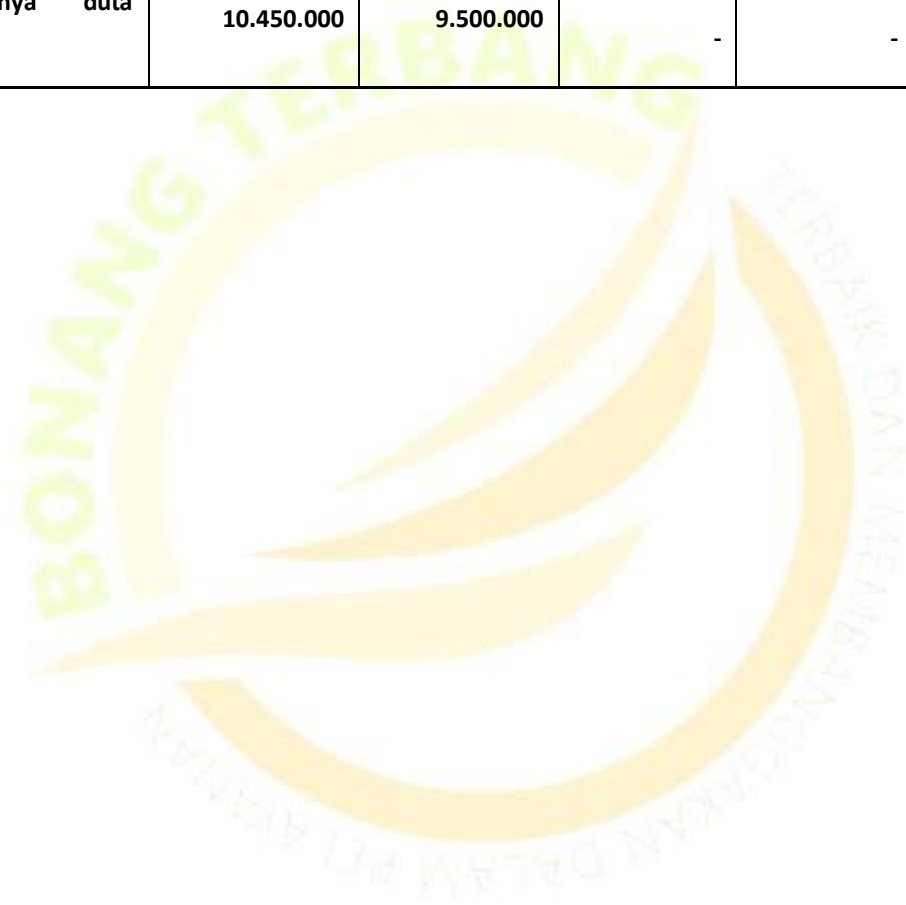
5	2	18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan SDM aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa	116.033.500	81.485.000	9.000.000	9.000.000	100	15.000.000	105.485.000	90,91
			Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah apartur pemerintah desa yang mendapatkn pelatihan dan bimbingan teknis bidang manajemen pemdes	27.500.000	10.000.000			#DIV/0!	15.000.000	25.000.000	90,91
			Pembinaan Adminitrasi Pemerintahan desa	Cakupan Desa desa yang mendapatkan pembinaan adminsitrasi	20.900.000	19.000.000			#DIV/0!		19.000.000	90,91
			Pelatihan aparatur Pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Jumlah apartur pemerintah desa yang mendapatkn pelatihan dan bimbingan teknis bidang keuangan	42.350.000	29.500.000	9.000.000	9.000.000	100		38.500.000	90,91

				desa							
				Fasilitasi aparatur pemerntahan desa dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan	Jumlah apartur pemerintah desa yang mendapatkn pelatihan dan bimbingan teknis bidang perencanaan pembangunan	-	-		#DIV/0!	-	#DIV/0!
				Pemilihan BPD	Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan BPD	-	0		#DIV/0!	-	#DIV/0!
				Fasilitasi Pilkades	jumlah desa yg menyelenggarakan Pilkades	8.800.000	8.000.000		#DIV/0!	8.000.000	90,91
				Fasilitasi Pengisian Perangkat desa	Jumlah desa yg menyelenggarakan pemilihan Perangkat Desa	16.483.500	14.985.000		#DIV/0!	14.985.000	90,91

			Program Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kepuasan masyarakat yang dilayani	13.860.000	7.600.000	5.000.000	5.000.000	100		12.600.000	90,91
			Peningkatan Pelayanan Administrasi terpadu	Terwujudnya pelayanan publik di kecamatan	13.860.000	7.600.000	5.000.000	5.000.000	100		12.600.000	90,91
			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		-				#DIV/0!		-	#DIV/0!
			Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Tertibnya pelaksanaan pembangunan di desa	215.945.000	114.950.000	35.000.000	35.000.000	100	10.000.000	159.950.000	74,07
			Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan	Mewujudkan lembaga dan organisasi masyarakat yang baik	67.650.000	16.500.000	35.000.000	35.000.000	100	10.000.000	61.500.000	90,91
			Pemberdayaan perempuan	Jumlah Desa yang didampingi dan dibina Organisasi Perempuan.	108.249.000	66.590.000			#DIV/0!		66.590.000	61,52

			Fasilitasi APBDes(DD,ADD,PADesa)	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi kegiatan APBDes (DD, ADD dan PADes)	7.656.000	6.960.000			#DIV/0!	6.960.000	90,91
			Pembinaan dan Pelaksanaan Desa Percontohan (Lomba Desa)	Jumlah Desa/kelurahan yg dibina dalam lomba desa	32.390.000	24.900.000			#DIV/0!	24.900.000	76,88
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		9.400.000	-	4.000.000	4.000.000	100	4.000.000	42,55
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar	Tercapaiannya Pendidikan yang efektif dan efisien	9.400.000		4.000.000	4.000.000	100	4.000.000	42,55
			Program Peningkatan peran serta Kepemudaan	Terwujudnya peran pemuda dan karangtaruna	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!

				Pembinaan cabang olahraga berprestasi	Terpenuhinya atlit prestasi	-			-	#DIV/0!		-	#DIV/0!
				Program pengembangan Kemitraan	Terpilihnya duta wisata	10.450.000	9.500.000	-	-	#DIV/0!		9.500.000	90,91



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dalam beberapa tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan Publik Kecamatan di Kabupaten Demak mengalami peningkatan. Beberapa indikator Kinerja Kunci Pelayanan Perangkat Daerah yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah Prosentase Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

No	Indikator Renstra	SPM/ Standar Nasional	IKK	Standar SPM/Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai Survei Kepuasan Masyarakat)	-	-	81,25	82,31	83,55	84,53	81,25	82,31	83,30	84,35	

Dari tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Kecamatan Bonang Kabupaten Demak pada tahun n-2 indikator Persentase Kualitas Pelayanan Publik kabupaten dalam kondisi baik capaian realisasi kinerja terhadap target kinerja mengalami kenaikan yaitu target di Renstra 93,54% dan realisasi 96,75% itu dikarenakan Keberhasilan pencapaian sasaran 3, yaitu :

- 1) Meningkatnya Ketentraman Wilayah dan Kualitas Pelayanan Administrasi Kecamatan.
- 2) Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Pembangunan
- 3) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Wilayah Kecamatan

2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

Beberapa isu strategis yang masih dihadapi oleh Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dalam menjalankan fungsinya di bidang Urusan Non Bidang (Pelayanan Publik), diantaranya;

- 1) Masih kurangnya Ketentraman Wilayah dan Kualitas Pelayanan Administrasi Kecamatan.
- 2) Masih kurangnya Peran Masyarakat dalam Pembangunan
- 3) Masih kurangnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Wilayah Kecamatan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2020 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD dan RKPD. Guna menghasilkan suatu Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka diperlukan suatu telaahan (review) terhadap rancangan awal penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Demak Tahun 2020 adalah sesuai dengan Tabel 2.4 bahwa rancangan awal RKPD dan Hasil analisis kebutuhan mengalami perbedaan yaitu rancangan awal RKPD pagu anggarannya lebih besar daripada hasil analisa kebutuhan adapun yang melatar belakangi hal tersebut adalah

- a. Pada waktu penyusunan rancangan awal RKPD semua usulan baik usulan musrenbangcam, usulan akselerasi, usulan aspirasi dewan, usulan usulan OPD dan Usulan Prioritas bupati dimasukkan semuanya tanpa memperhatikan kemampuan APBD Kabupaten Demak selanjutnya dengan berkembangnyawaktuberdasardarikemampuanAPBDKabupatenDemak sehingga dirubah usulan rancangan awal RKPD di potong sesuai dengan kemampuan APBD KabupatenDemak.
- b. Diharapkan usulan – usulan Program dan Kegiatan yang ada di Kecamatan dapatditambahnggarannya,sehinggadapatoptimaldalammelaksanakan tugas yang ada diKecamatan.



Pemetaan Nomenklatur Program / Kegiatan Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019

RENSTRA				NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KETERANGAN
URUSAN KEWILAYAHAN	KECAMATAN	Program peningkatan penghayatan pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan	Pemilihan dan pengiriman utusan kecamatan ke MTQ Tk. Kab						
		Pembinaan, seleksi, pengiriman peserta MTQ	Jumlah peserta MTQ yang dikirim	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemilihan dan pengiriman utusan kecamatan ke MTQ Tk. Kab	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah peserta MTQ yang dikirim	
		Program Pengembangan Kemitraan	Pemilihan dan pengiriman utusan kecamatan ke Lomba Duta Wisata Tk. Kab						

		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah duta wisata kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemilihan dan pengiriman utusan kecamatan ke Lomba Duta Wisata Tk. Kab	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah duta wisata kecamatan	
		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah desa yang dibina						
		Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Jumlah Desa/kelurahan yg dibina dalam lomba desa	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah desa yang dibina	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Desa/kelurahan yg dibina dalam lomba desa	
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah organisasi di kecamatan yang dibina						
		Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	UKS, GSIB, Komcat Lansia, SKPG, PMI, Gaky, GNOTA, Pramuka, KLA, PPT, KOK, Kampung KB, Karang Taruna	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah organisasi di kecamatan yang dibina	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintah desa	Fasilitasi pelaksanaan Tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	UKS, GSIB, Komcat Lansia, SKPG, PMI, Gaky, GNOTA, Pramuka, KLA, PPT, KOK, Kampung KB, Karang Taruna	

		Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Desa yang didampingi dan dibina Organisasi Perempuan.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah organisasi di kecamatan yang dibina	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintah desa	Fasilitasi pelaksanaan Tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Jumlah Desa yang didampingi dan dibina Organisasi Perempuan.	
		Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	Jumlah PMKS yang dibina						
		Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah warga miskin yang dilatih	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah PMKS yang dibina	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah warga miskin yang dilatih	
		Program peningkatan penanggulangan narkoba pms, termasuk HIV/AIDS	Jumlah pemuda / pelajar yang mendapatkan penyuluhan						

		Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Peserta penyuluhan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah pemuda / pelajar yang mendapatkan penyuluhan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Peserta penyuluhan	
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Prosentase guru TK yang dibina						
		Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	jml penyelenggaraan Rakor dan kerjasama PAUD, Kelompok Bermain dan TK se kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase guru TK yang dibina	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	jml penyelenggaraan Rakor dan kerjasama PAUD, Kelompok Bermain dan TK se kecamatan	
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah cabang lah raga yang dibina						
		Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah cabang lah raga yang dibina	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		

		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Prosentase peringatan hari-hari besar nasional dan daerah						
		Pentas seni dan budaya	Jumlah duta seni budaya yang dikirim	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase peringatan hari-hari besar nasional dan daerah	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah duta seni budaya yang dikirim	
		Program reformasi birokrasi	Prosentase kepuasan masyarakat berdasarkan survey kepuasan						
		Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Jml best practice pelayanan publik di kecamatan (kec)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase kepuasan masyarakat berdasarkan survey kepuasan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jml best practice pelayanan publik di kecamatan (kec)	
		Program perencanaan pembangunan daerah	Dokumen Musrenbang Kecamatan						

		Musrenbangcam	Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Dokumen Musrenbang Kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan	
		Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Monitoring dan fasilitasi BUMDES						
		Fasilitasi dan pendampingan pendirian Bumdes	Monitoring dan fasilitasi BUMDES	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Monitoring dan fasilitasi BUMDES	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Monitoring dan fasilitasi BUMDES	
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Prosentase kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian dan UMKM yang terfasilitasi						

			Data UMKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian dan UMKM yang terfasilitasi	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Data UMKM	
		Pendataan dan fasilitasi perijinan kegiatan umkm		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian dan UMKM yang terfasilitasi	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah perijinan UMKM yang dikeluarkan	
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Promosi produk desa yang dikuti						
		Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi	Jumlah produk lokal yang dipromosikan dan teregistrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Promosi produk desa yang dikuti	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja	Jumlah produk lokal yang dipromosikan dan teregistrasi	

							Kecamatan		
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah patroli keamanan dan lingkungan						
		Pengendalian keamanan lingkungan	jumlah wilayah yang menjadi cakupan patroli	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah patroli keamanan dan lingkungan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	jumlah wilayah yang menjadi cakupan patroli	
		pembinaan PKL	jumlah PKL yang dibina	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah patroli keamanan dan lingkungan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	jumlah PKL yang dibina	
		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Jumlah pembinaan ulama umaro						

		Forum komunikasi ulama dan umaro	Jumlah penyelenggaraan kegiatan FKUU	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pembinaan ulama umaro	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan kegiatan FKUU	
		Program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah aparat linmas desa yang dibina						
		Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah aparat yang dilatih dibidang siskamswakarsa	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah aparat linmas desa yang dibina	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah aparat yang dilatih dibidang siskamswakarsa	
		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Prosentase peringatan hari-hari besar nasional dan daerah						
		Upacara hari-hari besar nasional maupun daerah	Jumlah penyelenggaraan upacara hari-hari besar nasional dan daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase peringatan hari-hari besar nasional dan daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	Jumlah penyelenggaraan upacara hari-hari besar nasional dan daerah	

						Daerah	Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		
		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Prosentase penanganan bencana alam						
		Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Prosentase Desa yang menjadi cakupan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penanganan bencana alam	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase Desa yang menjadi cakupan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	
		Program peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa	Persentase SDM aparatur pemerintah kec dan desa yang dilatih/dibina						

		Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mendapatkn pelatihan dan bimbingan teknis bidang manajemen pemdes	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase SDM aparatur pemerintah kec dan desa yang dilatih/dibina	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah apartur pemerintah desa yang mendapatkn pelatihan dan bimbingan teknis bidang manajemen pemdes	
		Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Jumlah apartur pemerintah desa yang mendapatkn pelatihan dan bimbingan teknis bidang keuangan desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase SDM aparatur pemerintah kec dan desa yang dilatih/dibina	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah apartur pemerintah desa yang mendapatkn pelatihan dan bimbingan teknis bidang keuangan desa	
		Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah apartur pemerintah desa yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis bidang perencanaan pembangunan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase SDM aparatur pemerintah kec dan desa yang dilatih/dibina	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah apartur pemerintah desa yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis bidang perencanaan pembangunan	
		Fasilitasi Pilkades	Jumlah Desa yg menyelenggarakan pilkades	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase SDM aparatur pemerintah kec dan desa yang dilatih/dibina	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yg menyelenggarakan pilkades	

						Desa			
		Fasilitasi pemilihan BPD	Jumlah Desa yg menyelenggarakan pilihan BPD	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase SDM aparatur pemerintah kec dan desa yang dilatih/dibina	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Desa yg menyelenggarakan pilihan BPD	
		Fasilitasi Perangkat Desa	Jumlah Desa yg menyelenggarakan pilihan Perangkat Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase SDM aparatur pemerintah kec dan desa yang dilatih/dibina	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Desa yg menyelenggarakan pilihan Perangkat Desa	
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah desa yang menyusun APBDes						
		Fasilitasi kegiatan APBDes (DD, ADD dan PADes)	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi kegiatan APBDes (DD, ADD dan PADes)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang menyusun APBDes	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi kegiatan APBDes (DD, ADD dan PADes)	

		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tingkat pelunasan PBB						
		Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Besarnya nilai Pajak Bumi dan Bangunan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat pelunasan PBB	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Besarnya nilai Pajak Bumi dan Bangunan	
		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangannya						
		Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Jumlah rancangan Perdes APBDes yang dievaluasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangannya	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah rancangan Perdes APBDes yang dievaluasi	
		Pembinaan administrasi desa	Cakupan Desa desa yang mendapatkan pembinaan administrtasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangannya	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Cakupan Desa desa yang mendapatkan pembinaan administrtasi	

						Desa			
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan						
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan	ADMINISTRASI KEUANGAN	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan	ADMINISTRASI KEUANGAN	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhiya kebutuhan sarana adminsitasi perkantoran						
		Penyediaan jasa pegawai non PNS	Terlayaninya adm perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Terpenuhiya kebutuhan sarana adminsitasi	ADMINISTRASI KEUANGAN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlayaninya adm perkantoran	

				DAERAH	perkantoran				
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan sarana administrasi perkantoran						
		Penyediaan jasa surat menyurat	Terlayannya adm perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpenuhinya kebutuhan sarana administrasi perkantoran	ADMINISTRASI UMUM	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlayannya adm perkantoran	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlayannya adm perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpenuhinya kebutuhan sarana administrasi perkantoran	ADMINISTRASI UMUM	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlayannya adm perkantoran	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlayannya adm perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpenuhinya kebutuhan sarana administrasi perkantoran	ADMINISTRASI UMUM	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlayannya adm perkantoran	
		Penyediaan alat tulis kantor	Terlayannya adm perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpenuhinya kebutuhan sarana administrasi perkantoran	ADMINISTRASI UMUM	Penyediaan alat tulis kantor	Terlayannya adm perkantoran	

		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlayannya adm perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpenuhinya kebutuhan sarana administrasi perkantoran	ADMINISTRASI UMUM	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlayannya adm perkantoran	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Terlayannya adm perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpenuhinya kebutuhan sarana administrasi perkantoran	ADMINISTRASI UMUM	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlayannya adm perkantoran	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlayannya adm perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpenuhinya kebutuhan sarana administrasi perkantoran	ADMINISTRASI UMUM	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlayannya adm perkantoran	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlayannya adm perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpenuhinya kebutuhan sarana administrasi perkantoran	ADMINISTRASI UMUM	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlayannya adm perkantoran	
		Penyediaan makanan dan minuman	Terlayannya adm perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpenuhinya kebutuhan sarana administrasi perkantoran	ADMINISTRASI UMUM	Penyediaan makanan dan minuman	Terlayannya adm perkantoran	

		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlayannya adm perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpenuhinya kebutuhan sarana adminsitrasi perkantoran	ADMINISTRASI UMUM	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlayannya adm perkantoran	
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase peningkatan sarpras aparatur						
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yg diadakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase peningkatan sarpras aparatur	ADMINISTRASI UMUM	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yg diadakan	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase peningkatan sarpras aparatur	ADMINISTRASI UMUM	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur	
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase peningkatan sarpras aparatur	ADMINISTRASI UMUM	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	
		Pengadaan peralatan kantor	Jumlah Peralatan Kantor yg diadakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Prosentase peningkatan sarpras aparatur	ADMINISTRASI UMUM	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor yg diadakan	

				DAERAH					
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase peningkatan sarpras aparatur	ADMINISTRASI UMUM	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur	
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase peningkatan sarpras aparatur	ADMINISTRASI UMUM	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur	
		Pengadaan mebeleur	Jumlah meubelair yg diadakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase peningkatan sarpras aparatur	ADMINISTRASI UMUM	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubelair yg diadakan	
		Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase peningkatan sarpras aparatur	ADMINISTRASI UMUM	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur	
		Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase peningkatan sarpras aparatur	ADMINISTRASI UMUM	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur	

		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase peningkatan sarpras aparatur	ADMINISTRASI UMUM	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur	
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pegawai yang mengikuti diklat atau workshop						
		Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mendapatkan pelatihan dan bimtek	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pegawai yang mengikuti diklat atau workshop	PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mendapatkan pelatihan dan bimtek	
		Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase tingkat kehadiran pegawai						
		Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin absensi elektronik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase tingkat kehadiran pegawai	PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin absensi elektronik	
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase tingkat kehadiran pegawai	PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas aparatur	

		Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Panjang jalan desa, jumlah jembatan kondisi baik serta panjang talud yang dibangun					
--	--	--	--	--	--	--	--	--



2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun berdasarkan data dari Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2021 adapun proses penyusunan RKPD Tahun 2021 diawali dari Forum Perangkat Daerah hingga ke Musrenbang Tahun 2020. Didalam musrenbang terdapat aspirasi usulan dari para pemangku kepentingan kegiatan masyarakat diantaranya usulan musrenbang dari masing-masing Desa, usulan akselerasi merupakan usulan prioritas dari masing-masing Kecamatan. Adapun masing-masing usulan dari para pemangku kegiatan yang masuk di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak terdiri dari :

Tabel 2.4

Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Kabupaten Demak

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan Mobil Siaga (Ambulance)	Desa Serangan	Dinas Kesehatan	250.000.000	Mobil Baru
2	Betonisasi jalan ke sawah	Rt. 06/04 Ds Betahwalang	Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	350.000.000	2m x 400m
3	Pembangunan jembatan Gotanjang	Dk. Gebang kulon Rw. 04	Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	200.000.000	Renovasi
4	Talud Sungai Tuntang Lama Selatan	Desa Bonangrejo	Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	1.000.000.000	
5	Sungai Tuntang Lama Barat Pembuangan Air	Desa Purworejo	Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	1.000.000.000	

6	Jalan Alternatif Ds. Sukodono-Donorejo	Desa Sukodono	Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	1.000.000.000	
7	Jalan Utama Poncoharjo-Karangmlati	Desa Poncoharjo	Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	2.000.000.000	
8	Pengadaan Pompa Pertanian	Desa Gebang	Dinas Pertanian dan Pangan	800.000.000	
9	Pengadaan Pompa Pertanian	Desa Tridonorejo	Dinas Pertanian dan Pangan	400.000.000	
10	Jembatan Kali Kontrak-Morodemak	Desa Morodemak	Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	500.000.000	
11	pembangunan Jembatan Penghubung Kali Tuntang	Rw. 04	Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	11.000.000.000	Pembangunan Baru
12	Betonisasi Jalan Alternatif Baru Timur Desa Jali	Desa Jali	Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	750.000.000	Baru, P : 500 m x L : 2,5 m x T : 0,2
13	Peningkatan jalan beton bertulang jalan penghubung antar Desa	Desa Jatimulyo-Desa Sukodono dan Desa Krajanbogo	Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	1.000.000.000	1500 m x 4 m x 0,20 m
14	Pengerukan saluran pembuangan air Desa Jatirogo, Desa Tridonorejo, Desa Serangan menuju Sungai Kalijajar	Desa Jatirogo, Desa Tridonorejo, Desa Serangan	Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	800.000.000	4 x 3 m x 300 m, melewati 3 Desa (sangat penting karena utk mengurangi banjir yg mengenangi sawah 3 Desa yg dilewati)
15	Pembangunan Talud dan betonisasi jalan tanggul anyar	Dk Klitih menuju Desa Gebangarum	Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	90.000.000	Pekerjaan baru

16	Betonisasi jalan Desa Kembangan - Desa Sumberejo	Desa Kembangan - Desa Sumberejo	Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	500.000.000	Baru
17	Betonisasi jalan Desa	Rw. 04, Rw. 03, Rw. 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	2.400.000.000	Baru
18	Peninggian dan Betonisasi jalan Desa Morodemak Bulusan Kec. Karangtengah	Desa Morodemak Rt 004/Rw. 005	Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	1.000.000.000	Baru
19	Talud jalan Platar	Jalan penghubung Desa Poncoharjo - Karangmlati	Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	1.000.000.000	uk. 2 x 130 x 2000 M
20	Pembangunan Betonisasi jalan (peninggian jalan)	Jl. Demak - Moro Desa Purworejo Rw. 01 Rw. 03	Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	4.000.000.000	Usulan Baru
21	Pembangunan Talud Sungai Duku Krajan ke Desa Donorojo	Sungai duku Krajan Desa Sukodono ke Desa Donorojo	Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	150.000.000	uk. 150 x 2 x 0.9 m
22	Bendungan / Kracaan kali Tuntang	Kali Tuntang Sumberejo	Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	500.000.000	Menahan air asin dan untuk pengairan sawah
23	Pembangunan talud jalan Raya Rt. 01 sampai Rt. 05 Rw. 01	Desa Tridonorejo	Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	1.500.000.000	Baru
24	Pembangunan Talud Saluran irigasi	Desa Krajan Barat	Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	300.000.000	Saluran sering longsor

25	Pembangunan Jembatan	Wonosari - dukuh ngangkrang Tempuran	Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	300.000.000	Kerjasama antar Desa
26	Normalisasi Sungai	Margolinduk Rw. 1,Rw. 2 dan Rw 3	Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	400.000.000	Pemukiman Penduduk
27	Gapuro Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang		120.000.000	1 Paket
28	Normalisasi Sungai Desa Jali - Desa Ruwit	Desa Jali Kec. Bonang	Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	1.000.000.000	
29	Jalan Penghubung antara Desa Jatimulyo - Desa Krajanbogo	Desa Jatimulyo	Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	1.000.000.000	
30	Pembangunan Talud Desa Jatimulyo, Desa Sukodono dan Desa Krajanbogo	Desa Jatimulyo	Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	1.650.000.000	
31	Pembangunan Betonisasi jalan antar Desa (Kalikondang, Sumberejo, Kembangan)	Desa Sumberejo	Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	2.000.000.000	
32	Pembangunan Betonisasi Jalan Antar Desa (Gebangarum - Morodemak)	Desa Gebangarum	Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	2.000.000.000	
33	Normalisasi Sungai air irigasi Pertanian	Desa Jatimulyo	Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	200.000.000	
34	Normalisasi Kali Tuntang	Desa Gebangarum	Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	800.000.000	

35	Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Gebang - Tridonorejo	Desa Gebang	Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	300.000.000	
36	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kali Cangkring	Desa Gebang - Desa Gebangarum	Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	150.000.000	
37	Pembangunan Jembatan Penghubung antar Desa	Desa Morodemak-Margolinduk-Gebang-Tridonorejo	Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	641.000.000	60 Meter
38	Pembangunan Jalan penghubung antar Desa	Desa Jali - Desa Weding	Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	300.000.000	
39	Pembangunan Jalan Penghubung (HOT MIX)	Desa Betahwalang-Desa Serangan	Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	1.000.000.000	
40	Pembangunan Betonisasi Jalan Dukuh Pangkalan, Babadan, Prigi	Desa Serangan	Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	2.000.000.000	
41	Pembangunan Betonisasi Jalan Penghubung Desa Betahwalang - Gojoyo	Desa Betahwalang	Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	500.000.000	
42	Pembangunan Betonisasi Jalan Penghubung	Desa Gebang	Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	200.000.000	
43	Pembangunan Betonisasi Jalan	Desa Kembangan	Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	500.000.000	
44	Betonisasi Jalan Penghubung Desa Tlogoboyo ke Desa Jatimulyo	Desa Tlogoboyo	Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	200.000.000	

45	Peninggian Kali Kontrak Sumberejo - Desa Morodemak	Desa Morodemak	Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	2.000.000.000	
----	--	-------------------	---	---------------	--

- a. Usulan Musrenbangcam sebanyak 45 Pekerjaan
- b. Usulan yang di akomodir ada 2 Pekerjaan.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakannasional

Arah kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2021 merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan Pembangunan Nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

3.2 Tujuan Kecamatan Bonang

Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Strategis maka Kecamatan Bonang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik Kecamatan.

3.3 Sasaran

Untuk mencapai tujuan di atas, ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan sebagai sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka Satu (1) tahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di Kecamatan Bonang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Pembangunan
2. Meningkatnya Ketentraman Wilayah dan Kualitas Pelayanan Administrasi Kecamatan.
3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Wilayah Kecamatan

3.4 Program dan kegiatan

Kecamatan Bonang untuk periode 2021 adalah sebagai berikut:

Kode	Unit / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Pekerjaan	Indikator
1	2	3
4.1.12	KECAMATAN BONANG	
0,0	URUSAN NON BIDANG	
1	KECAMATAN BONANG	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase sarana dan prasarana kegiatan urusan pemerintahan
202	Administrasi Keuangan	Terpenuhinya kebutuhan sarana administrasi keuangan
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlayannya Keuangan perkantoran
1	Gaji pokok PNS/uang Representasi	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
2	Tunjangan Keluarga	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
3	Tunjangan Jabatan	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
4	Tunjangan Fungsional Umum	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
5	Tunjangan Beras	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
6	Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
7	Pembulatan Gaji	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
8	Iuran Asuransi Kesehatan	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
9	Jaminan Kecelakaan Kerja	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas

Kode	Unit / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Pekerjaan	Indikator
1	2	3
10	Jaminan Kematian	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
11	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Kontrak yang terbayarkan
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
203	Administrasi Umum	Terpenuhinya kebutuhan sarana administrasi perkantoran
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlayannya administrasi perkantoran
3	Penyediaan jasa surat menyurat	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlayannya administrasi perkantoran
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlayannya administrasi perkantoran
1	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlayannya administrasi perkantoran
1	Penyediaan alat tulis kantor	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlayannya administrasi perkantoran
1	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas

12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlayannya administrasi perkantoran
2	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
Kode	Unit / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Pekerjaan	Indikator
1	2	3
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlayannya administrasi perkantoran
1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlayannya administrasi perkantoran
1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlayannya administrasi perkantoran
1	Penyediaan makanan dan minuman	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlayannya administrasi perkantoran
1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlayannya administrasi Perkantoran
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlayannya administrasi perkantoran
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlayannya administrasi perkantoran

1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlayannya administrasi perkantoran
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlayannya administrasi perkantoran
Kode	Unit / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Pekerjaan	Indikator
1	2	3
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlayannya administrasi perkantoran
1	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlayannya administrasi perkantoran
1	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
204	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terwujudnya pakaian dinas beserta perlengkapannya
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
9	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Sarana Pendukung

		Pelaksanaan Tugas
7,1	URUSAN KECAMATAN	
1	KECAMATAN BONANG	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berjalan dengan baik
201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan PD/instansi vertikal
Kode	Unit / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Pekerjaan	Indikator
1	2	3
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan PD/instansi vertikal
1	Lomba Desa	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
2	Duta Wisata	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
3	Koordinasi PAUD	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
4	Pembinaan UKS	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
5	Pengiriman Peserta Karnaval/Kirab Budaya	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jml pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Camat
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jml pelimpahan urusan pemerintahan yang

		dilaksanakan Camat
1	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase jumlah desa/kelurahan yang dapat di perdayakan
201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan desa
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah forum musrenbang yang dilaksanakan
1	Musrenbang RKPD	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan keamanan dan ketertiban umum wilayah
Kode	Unit / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Pekerjaan	Indikator
1	2	3
201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Pengendalian keamanan lingkungan
1	Pengendalian keamanan lingkungan (Forkompincam)	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jml forum komunikasi dlm rangka harmonisasi hubungan dengan tokoh
1	Penyelenggaraan Forum komunikasi ulama dan umaro (FKUU)	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas

202	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah koordinasi penerapab dan penegakan perda dan perkad
1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jml pelatihan siskamswakarsa
1	Siskamswakarsa	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana
201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan umum
Kode	Unit / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Pekerjaan	Indikator
1	2	3
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jml kegiatan dlm rangka pembinaan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan
1	Upacara hari-hari besar nasional maupun daerah	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan yang terlaksana
201	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan

		pemerintahan yang terlaksana
2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jml pembinaan/sosialisasi/ bimbingan teknis yang dilaksanakan
1	Pembinaan Administrasi Desa	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jml kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa
1	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
2	Intensifikasi PBB	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
3	Evaluasi Rancangan APBDes/ RAPBDEs	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
Kode	Unit / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Pekerjaan	Indikator
1	2	3
4	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan APBDes (ADD, DD, PADes)	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Desa yang didampingi dan dibina Organisasi Perempuan.
1	PKK	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bonang Kabupaten Demak beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Matrik Musrenbang Kabupaten Tahun Perencanaan 2021
Pemerintah Kabupaten Demak

Kode	Unit / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1.12	KECAMATAN BONANG				3.247.013.549				3.247.013.549
0,0	URUSAN NON BIDANG				3.104.013.549				3.104.013.549
1	KECAMATAN BONANG				3.104.013.549				3.104.013.549
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase sarana dan prasarana kegiatan	Kec.Bonang	100,0 %	3.104.013.549	APBD		1	3.104.013.549

		urusan pemerintahan							
202	Administrasi Keuangan	Terpenuhinya kebutuhan sarana adminsitrase keuangan	Kec.Bonang	12.0 Bulan	2.429.090.000	APBD		12.0 Bulan	2.429.090.000
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlayannya Keuangan perkantoran	Kec.Bonang	12.0 Bulan	2.326.390.000	APBD		12.0 Bulan	2.326.390.000
1	Gaji pokok PNS/uang Representasi	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	Kec.Bonang	1 Tahun	1.182.935.304	APBD		1 Tahun	1.182.935.304
2	Tunjangan Keluarga	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	Kec.Bonang	1 Tahun	126.435.545	APBD		1 Tahun	126.435.545
3	Tunjangan Jabatan	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	Kec.Bonang	1 Tahun	78.460.429	APBD		1 Tahun	78.460.429
4	Tunjangan Fungsional Umum	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	Kec.Bonang	1 Tahun	39.654.380	APBD		1 Tahun	39.654.380
5	Tunjangan Beras	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	Kec.Bonang	1 Tahun	77.773.336	APBD		1 Tahun	77.773.336
6	Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	Kec.Bonang	1 Tahun	11.510.378	APBD		1 Tahun	11.510.378
7	Pembulatan Gaji	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	Kec.Bonang	1 Tahun	20.628	APBD		1 Tahun	20.628
8	Iuran Asuransi Kesehatan	Sarana Pendukung	Kec.Bonang	1 Tahun	81.000.000	APBD		1 Tahun	81.000.000

		Pelaksanaan Tugas							
9	Jaminan Kecelakaan Kerja	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	Kec.Bonang	1 Tahun	6.000.000	APBD		1 Tahun	6.000.000
10	Jaminan Kematian	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	Kec.Bonang	1 Tahun	8.800.000	APBD		1 Tahun	8.800.000
11	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	Kec.Bonang	1 Tahun	713.800.000	APBD		1 Tahun	713.800.000
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Kontrak yang terbayarkan	Kec.Bonang	100,0 %	102.700.000	APBD		1	102.700.000
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	Kec.Bonang	1 Tahun	102.700.000	APBD		1 Tahun	102.700.000
203	Administrasi Umum	Terpenuhinya kebutuhan sarana administrasi perkantoran	Kec.Bonang	1.0 Tahun	580.673.549	APBD		1.0 Tahun	580.673.549
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlayannya administrasi perkantoran	Kec.Bonang	100,0 %	2.160.000	APBD		1	2.160.000
3	Penyediaan jasa surat menyurat	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	Kec.Bonang	12 Bulan	2.160.000	APBD		12 Bulan	2.160.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlayannya administrasi perkantoran	Kec.Bonang	100,0 %	38.500.000	APBD		1	38.500.000

1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	Kec.Bonang	12 Bulan	38.500.000	APBD		12 Bulan	38.500.000
7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlayannya administrasi perkantoran	Kec.Bonang	100,0 %	21.900.000	APBD		1	21.900.000
1	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	Kec.Bonang	12 Bulan	21.900.000	APBD		12 Bulan	21.900.000
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlayannya administrasi perkantoran	Kec.Bonang	100,0 %	19.361.960	APBD		1	19.361.960
1	Penyediaan alat tulis kantor	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	Kec.Bonang	12 Bulan	19.361.960	APBD		12 Bulan	19.361.960
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlayannya administrasi perkantoran	Kec.Bonang	100,0 %	6.000.000	APBD		1	6.000.000
1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	Kec.Bonang	12 Bulan	6.000.000	APBD		12 Bulan	6.000.000
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlayannya administrasi perkantoran	Kec.Bonang	100,0 %	16.000.000	APBD		1	16.000.000
2	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	Kec.Bonang	1 Tahun	16.000.000	APBD		1 Tahun	16.000.000
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlayannya administrasi	Kec.Bonang	100,0 %	4.575.000	APBD		1	4.575.000

		perkantoran							
1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	Kec.Bonang	1 Tahun	4.575.000	APBD		1 Tahun	4.575.000
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlayannya administrasi perkantoran	Kec.Bonang	100,0 %	1.800.000	APBD		1	1.800.000
1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	Kec.Bonang	1 Tahun	1.800.000	APBD		1 Tahun	1.800.000
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlayannya administrasi perkantoran	Kec.Bonang	100,0 %	49.000.000	APBD		1	49.000.000
1	Penyediaan makanan dan minuman	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	Kec.Bonang	1 Tahun	49.000.000	APBD		1 Tahun	49.000.000
18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlayannya administrasi perkantoran	Kec.Bonang	100,0 %	35.000.000	APBD		1	35.000.000
1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	Kec.Bonang	1 Tahun	35.000.000	APBD		1 Tahun	35.000.000
20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlayannya administrasi Perkantoran	Kec.Bonang	100,0 %	200.000.000	APBD		1	200.000.000
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	Kec.Bonang	1 Unit	200.000.000	APBD		1 Unit	200.000.000

22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlayannya administrasi perkantoran	Kec.Bonang	100,0 %	24.000.000	APBD		1	24.000.000
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	Kec.Bonang	1 Tahun	24.000.000	APBD		1 Tahun	24.000.000
24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlayannya administrasi perkantoran	Kec.Bonang	100,0 %	64.400.000	APBD		1	64.400.000
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	Kec.Bonang	1 Tahun	64.400.000	APBD		1 Tahun	64.400.000
28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlayannya administrasi perkantoran	Kec.Bonang	100,0 %	50.000.000	APBD		1	50.000.000
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	Kec.Bonang	1 Tahun	50.000.000	APBD		1 Tahun	50.000.000
30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlayannya administrasi perkantoran	Kec.Bonang	100,0 %	39.976.589	APBD		1	39.976.589
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	Kec.Bonang	1 Tahun	39.976.589	APBD		1 Tahun	39.976.589
32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlayannya administrasi perkantoran	Kec.Bonang	100,0 %	4.000.000	APBD		1	4.000.000

1	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	Kec.Bonang	1 Tahun	4.000.000	APBD		1 Tahun	4.000.000
34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlayannya administrasi perkantoran	Kec.Bonang	100,0 %	4.000.000	APBD		1	4.000.000
1	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	Kec.Bonang	1 Tahun	4.000.000	APBD		1 Tahun	4.000.000
204	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Kec.Bonang	100,0 %	94.250.000	APBD		1	94.250.000
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terwujudnya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kec.Bonang	100,0 %	14.250.000	APBD		1	14.250.000
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	Kec.Bonang	19 Stel	14.250.000	APBD		19 Stel	14.250.000
9	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Kec.Bonang	100,0 %	80.000.000	APBD		1	80.000.000
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	Kec.Bonang	1 Tahun	50.000.000	APBD		1 Tahun	50.000.000
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	Kec.Bonang	1 Tahun	30.000.000	APBD		1 Tahun	30.000.000
7,1	URUSAN KECAMATAN				143.000.000				143.000.000
1	KECAMATAN BONANG				143.000.000				143.000.000

2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berjalan dengan baik	100,0 %	100,0 %	20.000.000	APBD		1	20.000.000
201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan PD/instansi vertikal	100,0 %	100,0 %	20.000.000	APBD		1	20.000.000
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan PD/instansi vertikal	Kec.Bonang	12.0 Bulan	20.000.000	APBD		12.0 Bulan	20.000.000
1	Lomba Desa	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	Kec.Bonang	1 Kegiatan	5.000.000	APBD		1 Kegiatan	5.000.000
2	Duta Wisata	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	Kec.Bonang	1 Keg	0	APBD		1 Keg	0
3	Koordinasi PAUD	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	Kec.Bonang	1 Keg	0	APBD		1 Keg	0
4	Pembinaan UKS	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	Kec.Bonang	1 Kegiatan	5.000.000	APBD		1 Kegiatan	5.000.000
5	Pengiriman Peserta Karnaval/Kirab Budaya	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	Kec.Bonang	1 Kegiatan	10.000.000	APBD		1 Kegiatan	10.000.000

204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jml pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Camat	Kec.Bonang	100,0 %	0	APBD		1	0
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jml pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Camat	Kec.Bonang	21.0 Desa	0	APBD		21.0 Desa	0
1	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	Kec.Bonang	1 Kegiatan	0	APBD		1 Kegiatan	0
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase jumlah desa/kelurahan yang dapat di perdayakan	Kec.Bonang	100,0 %	8.000.000	APBD		1	8.000.000
201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan desa	Kec.Bonang	21.0 Desa	8.000.000	APBD		21.0 Desa	8.000.000
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah forum musrenbang yang dilaksanakan	Kec.Bonang	21.0 Desa	8.000.000	APBD		21.0 Desa	8.000.000
1	Musrenbang RKPD	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	Kec.Bonang	1 Kegiatan	8.000.000	APBD		1 Kegiatan	8.000.000
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan keamanan dan ketertiban umum wilayah	Kec.Bonang	100,0 %	50.000.000	APBD		1	50.000.000

201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban	Kec.Bonang	100,0 %	50.000.000	APBD		1	50.000.000
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Pengendalian keamanan lingkungan	Kec.Bonang	21.0 Desa	40.000.000	APBD		21.0 Desa	40.000.000
1	Pengendalian keamanan lingkungan (Forkompincam)	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	Kec.Bonang	21 Desa	40.000.000	APBD		21 Desa	40.000.000
2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jml forum komunikasi dlm rangka harmonisasi hubungan dengan tokoh	Kec.Bonang	21.0 Desa	10.000.000	APBD		21.0 Desa	10.000.000
1	Penyelenggaraan Forum komunikasi ulama dan umaro (FKUU)	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	Kec.Bonang	1 Keg	10.000.000	APBD		1 Keg	10.000.000
202	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah koordinasi penerapab dan penegakan perda dan perkad	Kec.Bonang	21,0 %	0	APBD		0	0
1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jml pelatihan siskamswakarsa	Kec.Bonang	21,0 %	0	APBD		0	0
1	Siskamswakarsa	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	Kec.Bonang	1 Kegiatan	0	APBD		1 Kegiatan	0

5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	Kec.Bonang	100,0 %	22.000.000	APBD		1	22.000.000
201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan umum	Kec.Bonang	100,0 %	22.000.000	APBD		1	22.000.000
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jml kegiatan dlm rangka pembinaan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan	100,0 %	100,0 %	22.000.000	APBD		1	22.000.000
1	Upacara hari-hari besar nasional maupun daerah	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	22.000.000	APBD		1 Kegiatan	22.000.000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan yang terlaksana	100,0 %	100,0 %	43.000.000	APBD		1	43.000.000
201	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan yang terlaksana	21.0 Desa	21.0 Desa	43.000.000	APBD		21.0 Desa	43.000.000

2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jml pembinaan/sosialisasi/ bimbingan teknis yang dilaksanakan	21.0 Desa	21.0 Desa	0	APBD		21.0 Desa	0
1	Pembinaan Administrasi Desa	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	21 Desa	21 Desa	0	APBD		21 Desa	0
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jml kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa	21.0 Desa	21.0 Desa	8.000.000	APBD		21.0 Desa	8.000.000
1	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	1 Keg	1 Keg	0	APBD		1 Keg	0
2	Intensifikasi PBB	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	1 Keg	1 Keg	0	APBD		1 Keg	0
3	Evaluasi Rancangan APBDes/ RAPBDEs	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	21 Desa	21 Desa	0	APBD		21 Desa	0
4	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan APBDes (ADD, DD, PADes)	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	Kec. Bonang	21 Desa	8.000.000	APBD		21 Desa	8.000.000
12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Desa yang didampingi dan dibina Organisasi Perempuan.	Kec. Bonang	21,0 %	35.000.000	APBD		0	35.000.000
1	PKK	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	Kec. Bonang	21 Desa	35.000.000	APBD		21 Desa	35.000.000

TOTAL PAGU INDIKATIF	3.247.013.549			3.247.013.549
----------------------	---------------	--	--	---------------



BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Rencana Strategis Kecamatan Bonang Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Demak yang dalam penyusunannya telah memperhatikan aspek normatif seperti yang telah diatur dalam peraturan perundangan. Penyusunan Rencana Strategis 2016 - 2021 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang otonomi daerah. Penyusunan program dalam renstra ini mengacu pada sejumlah program yang secara hierarkis pada yang lebih tinggi yaitu RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, RPJPD Kabupaten Demak serta produk-produk perencanaan yang telah ditetapkan dalam produk hukum yang mengikat. Dokumen renstra ini secara normatif telah diupayakan untuk mendukung program-program visi dan misi Bupati Demak yang telah ditetapkanyaitu:

Visi.

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*Clarity of direction*) berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Pemerintah Kabupaten Demak telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari Visi Bupati/ Wakil Bupati Demak, yaitu sebagai berikut :

“ Terwujudnya masyarakat Demak yang agamis lebih sejahtera, mandiri, maju, kompetitif, kondusif, berkepribadian dan demokratis ”

Misi

Berdasarkan padarumusan Visi Kabupaten Demak, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan prilaku masyarakat;
2. Mewujudkan tatakelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel;
3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi local serta mengurangi tingkat pengangguran;

4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, pembangunan kewilayahan dan menyeraskan pembangunan antar kota dan desa;
5. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sesuai standar serta perlindungan social dan penanggulangankemiskinan.
6. Menciptakan keamanan, ketertibaan dan lingkungan masyarakat yang kondusif;
7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olah raga, senibudaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan mengendalikan pertumbuhanpenduduk;
8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dan meningkatkan kualitas pelayananpublik;
9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaanSumberDaya Alam.

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Kecamatan Bonang Tahun 2016-2021 akan digunakan sebagai acuan bagi pelaku pembangunan di wilayah Kecamatan Bonang yang dalam implementasinya harus memperhatikan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Renstra ini merupakan pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan dengan time frame yang sama yaitu 2016 – 2021, dengan demikian akan terjadi kesamaan arah pembangunan selama 6 (enam) tahunke depan;
2. Renstra ini akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja setiap tahun baik yang bersumber danadari APBD maupunAPBN;
3. Penyusunan Renstra ini telah melalui berbagai tahapan dengan harapan program-program yang ada dalam Renstra agar sesuai dengan aspirasi pemerintahan kecamatan. Dengan demikian para pemangku kepentingan (stakeholder) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Demak akan memahami peran yang akan diambil selama lima tahun ke depan. Renstra Kecamatan Bonang Kabupaten Demak disamping menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sampai dengan tahun 2021 secara substansial juga berlaku sebagai Renstra transisi yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Renja) tahun 2022 sebelum tersusunnya Renstra tahun 2022 –2027.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2016 - 2021 disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah khususnya di sektor pemerintahan serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan bagi seluruh unit kerja dan stakeholder. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan
- 2) Rencana Strategis Kecamatan Bonang Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya.
- 3) Rencana Strategis Kecamatan Bonang dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Kecamatan Bonang Tahun 2016-2021 dan menjadi acuan bagi Sekretariat, Seksi-seksi dan Rencana Kerja Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
- 4) Rencana Strategis Kecamatan Bonang perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program serta kegiatan renstra, karena diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016-2021 dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016-2021.
- 5) Renstra Kecamatan Bonang dapat dilakukan revisi apabila ada perubahan kebijakan ditingkat nasional dan daerah.

5.3 Rencana tindak lanjut

Adapun Rencana Tindak Lanjut dalam Pelaksanaan Program dan kegiatan di OPD Kecamatan Bonang tahun 2021, dibidang Urusan Kewilayahan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya:

- 1) Memaksimalkan dan mensinergikan tupoksi Aparatur Kecamatan Bonang Kabupaten Demak
- 2) Meningkatkan pelayanan Publik yang Brain, Integritas, Semangat, Akuntabel
- 3) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan stakeholder lain yang terkait.

Keberhasilan Renja Kecamatan Bonang Kabupaten Demak ini sangat tergantung pada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Bonang Kabupaten Demak juga sangat tergantung kepada eksternal yang bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Dengan telah tersusunnya dokumen

Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2021 ini agar senantiasa dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan setiap Program dan kegiatan serta tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Demikian Rencana Kerja Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tahun 2021 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

